



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMAWAN JUDAWISASTRA
2. Jabatan : DEKAN FTMD
3. NHK : 817355

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.042.445.800**

1. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 313.728.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/66 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.157.936.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/98 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.899.847.800
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.450.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 458.630.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 36.450.000
7. Tanah Seluas 228 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 55.404.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **379.000.000**

1. MOBIL, BMW 318 IAE46 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV58 RS CVT ZZ Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 339.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	57.996.500
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.586.391.642
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.543.445.161
Sub Total	Rp.	9.609.279.103
III. HUTANG	Rp.	682.877.687
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.926.401.416

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.